

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM

Jabatan : KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Jabatan : Pih. GUBERNUR PAPUA

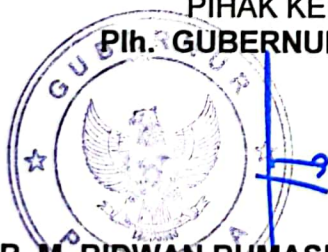
selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 30 Maret 2023

PIHAK KEDUA,
Pih. GUBERNUR PAPUA



DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM
NIP. 19641014 198603 1 016

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIRO

LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM
NIP. 19720911 199112 2 001

PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2023

Provinsi : Papua
SKPD : Biro Organisasi

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)
				2023	Rencana aksi target per triwulan/TW		
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Program Penataan Organisasi							
1	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Persentase	100	TW 1-4 = 1-12	Kegiatan : Fasilitasi kelembagaan dan Analsisi Jabatan Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan kelembagaan Provinsi	2.900.000.000,-
2		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Persentase	100	TW 1-4 = 1-12	Kegiatan : Fasilitasi kelembagaan dan Analsisi Jabatan Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan kelembagaan Kab/Kota	2.500.000.000,-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	100	TW 1-4 = 1-12	Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1.490.519.500,-
4	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur	Persentase	100	TW 1-4 = 1-12	Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	1.087.818.600,-

5	Terwujudnya Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	Pendampingan dan monev implementasi pola hubungan kerja antar SKPD	SKPD	17	TW 1-4 = 1-12	Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	302.866.100,-
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang Menggumpulkan/melaporkan Lkj/Lakip	Persentase	100	TW 1 = 2-3	Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	992.612.000,-
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan Lkj/Lakip	Persentase	100			
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI	Nilai	BB			
		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100			
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A	TW 4 = 10-12	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	16.055.000,-

8	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se- Papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Presentase	100	TW 1-4 = 3-12	Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	726.183.600,-
9	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan (Fungsional)	Persentase	100	TW 1-4 = 3-12	Kegiatan : Fasilitasi kelembagaan dan Analisis Jabatan Sub Kegiatan : Penataan Analisis Jabatan	3.477.980.416,-
10		Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua (Fungsional)	Persentase	100	TW 1-4 = 3-12		
12		Persentase SKPD Provinsi yang memiliki standar kompetensi (Fungsional)	Persentase	100	TW 1-4 = 3-12		

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program utama ataupun pendukung adalah :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penataan Organisasi	Rp. 13.477.980.216,-	Dana OTSUS Provinsi Papua
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 7.259.061.934,-	Dana OTSUS Provinsi Papua dan Dana Alokasi Umum(DAU)

Jayapura, 30 Maret 2023

PIHAK KEDUA,
Pih.GUBERNUR PAPUA,

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM
NIP. 19641014 198603 1 016

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIRO


LINDA .S. ONIBALA, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2 001